



Pengaruh Inovasi Digital terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Andimulu Hayu Fatimah^{1*}, Ria Ekanindya Widyaningsih²

^{1,2} Program Studi Sarjana Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hadisusanto1616@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the impact of digital innovation on financial management in Purbalingga Regency, focusing on two main systems: the Regional Government Information System (SIPD) and the Village Financial System (SISKEUDES). Digital innovation is considered important to enhance transparency, efficiency, and accountability in public financial management (Lips, 2020; Agostino, Bracci, & Steccolini, 2022). The method used is a qualitative approach with a case study supported by in-depth interviews with application users and previous research (Daffa, 2024; Nadaa & Priyanti, 2023). The findings show that the use of SIPD and SISKEUDES has successfully increased transparency and efficiency in financial reporting in Purbalingga through data integration and public access to information. However, technical issues, limited human resources, and lack of inter-agency cooperation remain obstacles. Efforts by the local government, such as routine training, system updates, and digital literacy improvement, have strengthened digital-based financial governance. Overall, this study shows that the success of digital innovation in public financial management is influenced not only by technology but also by institutional readiness, a culture of transparency, and community involvement in overseeing regional financial management.*

Keywords: *Accountability; Digitalization; Regional Finance; SIPD; SISKEUDES.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi digital terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Purbalingga, dengan fokus pada dua sistem utama: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Inovasi digital dianggap penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Lips, 2020; Agostino, Bracci, & Steccolini, 2022). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang diperkuat oleh wawancara mendalam dengan pengguna aplikasi serta penelitian terdahulu (Daffa, 2024; Nadaa & Priyanti, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dan SISKEUDES berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan keuangan di Purbalingga melalui integrasi data dan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat. Namun, kendala teknis, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya kerja sama antarinstansi masih menjadi hambatan. Upaya pemerintah daerah seperti pelatihan rutin, pembaruan sistem, dan peningkatan literasi digital telah memperkuat tata kelola keuangan berbasis digital. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi digital dalam pengelolaan keuangan publik dipengaruhi oleh kesiapan lembaga, budaya transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Digitalisasi; Keuangan Daerah; SIPD; SISKEUDES.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pemerintahan modern beroperasi, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Transformasi digital bukan hanya tentang menggunakan software, tetapi juga perubahan cara birokrasi dan layanan publik menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel (Lips, 2020). Pemerintah Indonesia telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta dua alat utama dalam bidang keuangan, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kedua sistem ini bertujuan mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

keuangan secara digital guna meningkatkan akuntabilitas fiskal. Seperti yang diungkapkan oleh Sunardi et al. (2021), informasi keuangan yang baik sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan kemampuan pengendalian intern yang efektif. Namun, penelitian yang sudah dilakukan oleh Daffa (2024), penerapan SIPD di tingkat daerah masih terhambat oleh kesiapan sumber daya manusia dan keterbatasan aspek teknis sistem.

Inovasi digital di sektor publik membutuhkan perubahan menyeluruh dalam strategi, proses, dan budaya organisasi pemerintahan (Larsson & Teigland, 2020). Dibeberapa wilayah di Indonesia, seperti pemerintah daerah Kota Lhokseumawe masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan tenaga kerja, dan hambatan dalam sistem organisasi saat menerapkan SIPD meskipun penerapannya sudah menjadi kewajiban nasional (Daffa, 2024). Di tingkat desa, studi tentang implementasi SISKEUDES Desa Karang Mukti di Karawang, menunjukkan bahwa masalah seperti kekurangan kesiapan SDM, jaringan internet yang tidak memadai, serta kurangnya bimbingan teknis menyebabkan proses digitalisasi tidak berjalan efektif (Nadaa & Priyanti, 2023). Penelitian internasional menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak hanya soal menggunakan teknologi, tetapi juga transformasi lembaga yang menitikberatkan pada pelayanan rakyat yang transparan dan partisipatif (Walo dkk., 2021). Dalam konteks ini, Kabupaten Purbalingga menjadi contoh nyata dalam penerapan kebijakan digital keuangan. Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola SIPD berbasis data terbuka per-kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (dinkominfo.purbalinggakab.go.id). Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan pelatihan SISKEUDES secara daring (online) bagi 224 desa (dinpermasdes.purbalinggakab.go.id). Fakta ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memanfaatkan inovasi digital guna meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan publik.

Namun, penerapan inovasi digital di daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Nadaa dan Priyanti (2023) menemukan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES masih menghadapi kendala seperti jaringan yang tidak stabil dan kesiapan sumber daya manusia yang rendah, sehingga efektivitasnya belum optimal. Sementara itu, upaya menciptakan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah kini menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan desa juga semakin mendapat perhatian untuk meningkatkan akuntabilitas, tetapi kenyataannya, tingkat akuntabilitas desa saat ini masih tergolong rendah (Thareq Kemal, 2022). Hal serupa terjadi pada SIPD, menurut Daffa (2024) yang menyebutkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas pegawai dan pembaruan sistem secara berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Agostino, Bracci, dan Steccolini (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi memerlukan

mekanisme akuntansi baru untuk mengelola data publik secara transparan dan etis. Oleh karena itu, kesiapan institusi, dukungan kebijakan, serta literasi digital pegawai menjadi faktor utama dalam keberhasilan transformasi digital di bidang keuangan daerah.

Secara konsep, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan digital meningkatkan transparansi dalam urusan keuangan pemerintah dan mengurangi campur tangan dari pihak aparatur pemerintah. Jin dan Wang (2025) menjelaskan bahwa pengawasan anggaran secara digital dan signifikan meningkatkan transparansi keuangan daerah dengan mengurangi pengaruh eksternal terhadap proses administratif. Hal ini menguatkan gagasan bahwa sistem pengawasan berbasis digital bisa menjadi alat penting untuk meningkatkan integritas pengelolaan uang daerah. Dalam bidang akuntansi publik, Agostino, Saliterer, dan Steccolini (2021) menekankan bahwa proses digitalisasi mengubah cara data keuangan dihasilkan dan digunakan, yang berpengaruh langsung terhadap meningkatnya akuntabilitas pemerintah kepada publik.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana dampak inovasi digital terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purbalingga. Fokus penelitian mencakup empat hal utama meliputi penerapan inovasi digital melalui SIPD dan SISKEUDES, hambatan teknis serta kelembagaan yang dihadapi pemerintah daerah, dampak dari inovasi digital terhadap transparansi dan efisiensi pelaporan keuangan publik, serta strategi terbaik untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dengan melengkapi studi tentang akuntabilitas publik berbasis digital, serta manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah dalam memperkuat sistem keuangan yang transparan dan berkelanjutan. Dengan demikian, tulisan ini berfokus pada hubungan antara transformasi digital dan akuntabilitas keuangan daerah, dengan keterbatasan ruang lingkup implementasi SIPD dan SISKEUDES di Kabupaten Purbalingga.

2. LANDASAN TEORI

Dari sudut pandang akuntansi publik, digitalisasi melalui sistem seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berperan meningkatkan kualitas data keuangan, mempercepat proses pelaporan, serta memperluas akses informasi untuk masyarakat, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Agostino, Saliterer, & Steccolini, 2021; Agostino, Bracci, & Steccolini, 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SIPD dan SISKEUDES di beberapa daerah di Indonesia memberikan hasil positif terhadap efisiensi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kesiapan kelembagaan (Daffa, 2024; Nadaa & Priyanti, 2023). Penelitian internasional juga mendukung argumen pengawasan dan pengelolaan anggaran berbasis digital secara signifikan meningkatkan transparansi fiskal dengan mengurangi pengaruh birokratis (Jin & Wang, 2025; Saldanha et al., 2022). Berdasarkan penggabungan teori dan temuan empiris tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menganggap inovasi digital (SIPD dan SISKEUDES) sebagai indikator utama yang memengaruhi transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan faktor kesiapan SDM, dukungan kelembagaan, dan infrastruktur digital sebagai faktor penentu keberhasilan implementasinya. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan inovasi digital melalui SIPD dan SISKEUDES berpengaruh positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purbalingga, meskipun pengaruhnya tersebut dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan dari pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus diperkuat dengan In Depth Interview dengan pengguna aplikasi, serta penelitian terdahulu ditambahkan dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Pendekatan penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi inovasi digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diterapkann dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus diperkuat dengan In Depth Interview dengan pengguna aplikasi, serta penelitian terdahulu memungkinkan peneliti untuk memahami proses, kendala, dan dampak inovasi digital terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah secara nyata seta mudah dipahami (Creswell, 2018).

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena memfokuskan pada satu lokasi penelitian yaitu Kabupaten Purbalingga, yang sudah mengimplementasikan sistem SIPD dan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan metode penelitian studi kasus, peneliti dapat menjelaskan informasi secara rinci terkait cara penerapan dan penggunaan sistem inovasi digital tersebut, dengan cara mengkaji masalah sosial, kelembagaan, dan teknis yang memberikan pengaruh terhadap sistem inovasi digital (Yin, 2014). Metode penelitian kualitatif yang sesuai dengan pendekatan studi kasus, sesuai dengan temuan penelitian oleh Daffa (2024)

mengenai bagaimana cara penerapan SIPD di Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, serta penelitian yang dilakukan Nadaa dan Priyanti (2023) mengenai bagaimana cara penerapan SISKEUDES di Desa Karang Mukti Kabupaten Karawang, menjelaskan bahwa pendekatan penelitian menggunakan metode studi kasus, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keberhasilan dan tantangan implementasi keuangan di tingkat daerah.

Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, diketahui daerah tersebut aktif dalam implementasi sistem keuangan SIPD dan SISKEUDES. Penelitian ini berfokus pada penggunaan dua sistem pengelolaan keuangan daerah yaitu:

a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem keuangan daerah tersebut dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Purbalingga.

b. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengelolaan sistem tersebut dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) di Kabupaten Purbalingga.

Sumber dan Jenis Data

Metode yang digunakan pada penelitian tersebut memanfaatkan sumber data In Depth Interview dengan pengguna aplikasi serta penelitian terdahulu. Penggunaan metode penelitian sumber data tersebut berdasarkan pada pengelolaan keuangan daerah dengan sistem digital di Kabupaten Purbalingga yang sudah dilakukan pencatatan secara teratur kedalam bentuk arsip resmi serta akses informasi data pemerintah, dan laporan kepada masyarakat. Ada beberapa jenis data yang digunakan dalam proses penelitian tersebut meliputi:

a. Dokumen resmi kebijakan penggunaan sistem SPBE, SIPD, dan SISKEUDES yang bersumber dari:

- 1) dinkominfo.purbalinggakab.go.id
- 2) data.jatengprov.go.id
- 3) dinpermasdes.purbalinggakab.go.id

b. Jurnal ilmiah serta laporan penelitian mengenai digitalisasi pengelolaan keuangan publik (Lips, 2020; Daffa, 2024; Nadaa & Priyanti, 2023; Agostino et al., 2022; Jin & Wang, 2025).

c. Publikasi akademik serta buku referensi yang membahas tentang sistem digitalisasi pemerintahan dan akuntabilitas publik.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat dikumpulkan dengan beberapa cara:

a. Merode In Depth Interview (wawancara secara mendalam)

Penelitian tersebut menggunakan metode In Depth Interview dengan pengguna aplikasi seperti operator SIPD, operator SISKEUDES, pejabat Dinpermasdes dan pejabat BPKAD, serta penelitian terdahulu ditambahkan dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

b. Metode Dokumentasi

Penelitian tersebut mengkaji dokumen yang membahas tentang penerapan inovasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

- 1) Dokumen pelaporan keuangan daerah serta pemeriksaan hasil audit yang berkaitan satu sama lain melalui sistem implementasi SIPD.
- 2) Mengenai pelaporan kegiatan pelatihan serta bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah menggunakan sistem keuangan SISKEUDES yang diselenggarakan secara online atau daring diikuti 224 desa di Kabupaten Purbalingga.
- 3) Akses portal data statistik keuangan dan informasi digitalisasi publik dari data provinsi.

c. Analisis Literatur Akademik

Memperkuat pendapat penelitian terdahulu mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah secara digital disektor publik maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam inovasi tersebut (Larsson & Teigland, 2020; Agostino et al., 2021; Walo dkk., 2021).

Analisis Data

Analisis data menggunakan proses pendekatan Miles & Huberman (2014) terdapat tiga tahapan dalam pendekatan ini yaitu:

a. Penyederhanaan data

Informasi penting yang dikutip dari beberapa dokumen yang saling berkaitan dengan sistem inovasi digital serta dikelompokkan berdasarkan penerapan, hambatan, dan dampaknya yang terdapat dalam sistem inovasi digital kepada masyarakat.

b. Penyajian data

Penelitian dengan gaya penulisan narasi deskriptif yang menjelaskan secara rinci pengelolaan sistem SIPD dan SISKEUDES untuk memahami lebih mendalam keterkaitan antara inovasi digital dan akuntabilitas pada tingkat daerah.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Memberikan pemahaman data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan penelitian serta memperkuat temuan dengan membandingkan sumber referensi tambahan seperti artikel ilmiah dan literatur terkait.

Analisis Hasil

Beberapa tahapan analisis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pemahaman secara menyeluruh mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah sistem SIPD dan SISKEUDES di Kabupaten Purbalingga.
- b. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem inovasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah seperti kesiapan instansi serta teknis dalam pengelolaan inovasi tersebut, dan sumber daya manusia yang memadai.
- c. Berdasarkan data yang diteliti untuk meningkatkan pengelolaan sistem keuangan publik yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Purbalingga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah menjadi sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Purbalingga. Pejabat BPKAD mengungkapkan, "Semua Organisasi Perangkat Desa (OPD) diwajibkan untuk menginput data perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui SIPD, sehingga data menjadi lebih terintegrasi dibandingkan periode sebelum tahun 2020". Pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian Fitriani (2024), yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Meskipun demikian, tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukungnya. Situasi ini sama dengan pendapat Agostino, Saliterer, & Steccolini (2021) yang menegaskan bahwa digitalisasi merubah proses data akuntansi, meningkatkan dan memperluas akses informasi bagi masyarakat. Selain itu, dokumen resmi dari Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga juga menyajikan data SIPD untuk setiap kecamatan dan OPD, yang

mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen yang dikemukakan oleh Saldanha et al. (2022) bahwa layanan publik digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penggunaan data dengan sistem pengelolaan SIPD memberikan pengaruh terhadap pencapaian yang maksimal dalam suatu instansi. Operator SIPD menjelaskan bahwa, “Sebelum penggunaan sistem tersebut penyusunan laporan keuangan daerah membutuhkan waktu beberapa minggu, akan tetapi saat ini bisa selesai dalam beberapa hari saja dikarenakan semua data sudah tersimpan serta terhubung secara otomatis dalam sistem”. Pernyataan tersebut mendukung penelitian Amalia & Suwondo (2023) yang menjelaskan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaporan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam pengelolaan laporan tersebut serta kurangnya kemampuan pemahaman dalam sistem pengelolaan dapat menghambat efektivitas inovasi digital. Hasil temuan penelitian yang sama dengan pendapat Agostino, Bracci, & Steccolini (2022) yang menegaskan bahwa sistem teknologi digital mempercepat proses kerja serta meningkatkan kemampuan secara terus menerus dalam bidang pengelolaan manajemen kinerja publik. Proses dalam penyusunan pengelolaan sistem keuangan daerah diantaranya. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta proses pemeriksaan dan pelaporan realisasi anggaran menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan SIPD mengurangi beban administratif serta memperkuat efisiensi antar instansi daerah.

Meskipun manfaatnya efektif dan signifikan, ada hambatan teknis yang tetap terjadi. Pejabat BPKAD mengungkapkan bahwa, “Server SIPD pusat sering mengalami gangguan, terutama saat input anggaran. Hal ini sangat menghambat kerja OPD”. Dengan demikian keterbatasan perangkat jaringan internet yang menjadi penghambat dalam proses penginputan data. Situasi yang sama dengan pendapat Daffa (2024) yang menjelaskan bahwa efektivitas implementasi sistem SIPD belum maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah akibatnya terkendala teknis serta keterbatasan sumber data manusia yang kurang memahami pengoperasian sistem tersebut. Pendapat Lips (2020) menegaskan bahwa perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah secara digital memerlukan beberapa kesiapan diantaranya kesiapan instansi serta penyesuaian sistem tersebut sehingga jika tidak ada kesiapan digitalisasi maka sistem tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Situasi tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan sistem implementasi SIPD tidak hanya bergantung pada kesiapan daerah akan tetapi juga bergantung pada kesiapan sistem nasional yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran sistem tersebut.

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Purbalingga

Penerapan sistem SISKEUDES di Desa Kejobong dan Kalimanah sudah dipraktikkan untuk mempermudah proses pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta bukti transaksi selama proses pengelolaan keuangan daerah. Operator SISKEUDES menjelaskan bahwa, “Implementasi SISKEUDES membuat proses pencatatan keuangan daerah lebih tertata rapi dan jika terdapat kesalahan dalam penginputan data maka langsung muncul peringatan secara otomatis”. Pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian Nadaa & Priyanti (2023), yang menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES dirancang untuk mempermudah perangkat desa dalam pengelolaan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 113/2014. Puspasari dan Purnama (2018) menekankan bahwa kualitas laporan keuangan desa sangat bergantung pada kemampuan operator dalam menggunakan aplikasi, namun dalam kenyataannya kemampuan tersebut belum merata di semua desa. Proses pelatihan implementasi sistem SISKEUDES melibatkan 224 desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) berkomitmen terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Purbalingga.

Masalah utama di tingkat desa adalah kesenjangan kompetensi digital. Operator desa menyampaikan, “Sebagian perangkat desa masih belum terbiasa menggunakan komputer, sehingga input data sering lambat”. Masalah ini sesuai dengan temuan Nadaa & Priyanti (2023) bahwa keterbatasan SDM serta literasi digital menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan SISKEUDES. Nur Pratiwi & Pravasanti (2020) menyatakan bahwa meskipun sistem SISKEUDES telah dirancang sederhana, banyak desa mengalami kesulitan teknis terutama pada tahap penganggaran dan pelaporan. Larsson & Teigland (2020) juga menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga membutuhkan perubahan pola kerja dan budaya organisasi. Hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi keuangan desa tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kemampuan operator yang menjadi pengguna utama.

Beberapa desa mengalami kendala jaringan internet yang tidak stabil. Pejabat Dinpermasdes menyatakan bahwa, “Desa dengan jaringan internet yang tidak stabil sering mengalami keterlambatan sinkronisasi data SISKEUDES”. Kendala ini sesuai dengan temuan Nadaa & Priyanti (2023) serta teori Koo (2019) tentang digital divide (akses digital) sebagai penghambat utama transformasi digital. Dampaknya antara lain, keterlambatan input data, potensi ketidaksesuaian antara data manual dan digital, proses audit desa menjadi lebih lama.

Implementasi SIPD dan SISKEUDES di Kabupaten Purbalingga

Digitalisasi melalui SIPD dan SISKEUDES telah memperkuat koordinasi data keuangan antara OPD, BPKAD, dan pemerintah desa. Pejabat Diskominfo mengatakan, “Jika semua unit sudah menggunakan sistem digital, integrasi data antarsektor akan lebih cepat dan akurat”. Temuan ini mendukung teori Agostino et al. (2021) yang menyatakan digitalisasi meningkatkan kualitas data akuntansi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Integrasi data membantu pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan, seperti yang ditegaskan oleh Larsson & Teigland (2020) bahwa transformasi digital mendukung manajemen berbasis data, memantau realisasi anggaran dengan lebih akurat, mengakses informasi keuangan dari tingkat desa hingga kabupaten secara lebih cepat, melakukan pengawasan internal maupun eksternal dengan lebih efisien.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara rutin mengadakan pelatihan tentang SIPD dan SISKEUDES. Pejabat BPKAD menjelaskan, “Pelatihan yang dilakukan secara rutin sangat membantu, terutama bagi pegawai yang baru masuk. Bimbingan sehari-hari juga mempercepat proses adaptasi dalam menggunakan aplikasi tersebut”. Temuan ini sesuai dengan rekomendasi Daffa (2024) yang menekankan pentingnya pelatihan yang berkelanjutan sebagai faktor utama keberhasilan dalam menerapkan SIPD. Strategi pelatihan ini juga mendukung pendapat Lips (2020) mengatakan bahwa pemerintahan yang digital membutuhkan strategi jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas SDM dan desain kelembagaan yang fleksibel. Langkah-langkah pelatihan tersebut menunjukkan bahwa Purbalingga memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan transformasi digital secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, inovasi digital melalui SIPD dan SISKEUDES berhasil meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah di Purbalingga. Penyebabnya yaitu, data lebih cepat dan lebih tepat, masyarakat bisa mengakses informasi lebih mudah, proses pemeriksaan keuangan jadi lebih transparan, kemungkinan manipulasi anggaran semakin kecil. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Jin & Wang (2025) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan berbasis digital meningkatkan transparansi anggaran karena mengurangi campur tangan birokrasi. Sesuai dengan teori Agostino, Saliterer, & Steccolini (2021), “Digitalisasi telah membawa perubahan penting dalam hal ketersediaan informasi baru dan cara data serta informasi dihasilkan”. Penerapan di Purbalingga menunjukkan langkah awal menuju pemerintahan digital yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penggunaan inovasi digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Purbalingga sudah memberikan dampak baik dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Purbalingga berkomitmen signifikan terhadap terbukanya data keuangan antar OPD dan adanya pelatihan yang dilakukan secara teratur bagi perangkat desa. Implementasi SIPD membantu operator mempercepat proses pelaporan keuangan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses data tersebut, sedangkan implementasi SISKEUDES meningkatkan ketepatan dan kelancaran dalam proses pelaporan keuangan di tingkat desa. Walaupun ada peningkatan inovasi belum sepenuhnya maksimal dalam implementasi SIPD dan SISKEUDES, karena terdapat beberapa hambatan teknis seperti, keterbatasan jaringan internet, kesulitan dalam mengoperasikan system dikarenakan tingkat kemampuan SDM yang belum memahami penggunaan aplikasi keuangan digital. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Agostino, Bracci, dan Steccolini (2022) serta Daffa (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tergantung pada kesiapan antar lembaga dan kemampuan operator dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Digitalisasi di Kabupaten Purbalingga tidak hanya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, tetapi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja publik. Menyediakan data keuangan daerah secara terbuka serta dapat diakses di portal pemerintah daerah merupakan bentuk pendekatan pertanggungjawaban yang menekankan pada proses komunikasi dua arah disebutkan oleh Agostino et al. (2021) dan Saldanha et al. (2022), di mana hubungan antara pemerintah dan masyarakat terjalin melalui transparansi dan akses data yang adil. Untuk memastikan inovasi digital terus berjalan, diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas teknis, memperbarui sistem secara rutin, serta membangun kerja sama lintas sektor, sesuai saran Daffa (2024) dan Nadaa & Priyanti (2023). Dengan kata lain, digitalisasi keuangan daerah tidak hanya sekadar perubahan teknologi, tetapi juga merupakan proses transformasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berintegritas.

Saran

Pemerintah daerah harus mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai dasar utama untuk mencapai keberhasilan dalam digitalisasi keuangan dengan mengadakan pelatihan SIPD dan SISKEUDES secara rutin dan berkelanjutan agar keahlian

teknis dan pemahaman mengenai akuntansi digital terus berkembang, seperti yang disarankan oleh Daffa (2024). Selain itu, perlu dukungan dalam bentuk layanan bantuan digital antarinstansi untuk menangani masalah teknis dengan cepat. Di samping itu, pengembangan dan pengintegrasian sistem dan data antar sektor perlu dilaksanakan dengan menyatukan SIPD dan SISKEUDES ke dalam sistem perencanaan serta audit internal untuk mencegah pengulangan data, mempercepat proses pelaporan, serta menjaga etika dan keamanan informasi sesuai pendapat Agostino et al. (2022). Upaya tersebut harus diperkuat dengan peningkatan partisipasi masyarakat melalui perluasan akses publik terhadap informasi keuangan, penyediaan saluran pengaduan, serta melibatkan perguruan tinggi dalam menilai sistem digital, sehingga inovasi digital berfungsi bukan hanya sebagai alat administratif, melainkan juga menjadi dasar untuk meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, serta budaya akuntabilitas keuangan daerah yang berkelanjutan di era pemerintahan digital.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas jangkauan objek serta pendekatan metode yang digunakan agar dapat mengungkap dampak inovasi digital terhadap akuntabilitas keuangan daerah secara lebih luas. Analisis perbandingan antar daerah seperti kabupaten atau kota, maupun antarprovinsi, bisa dilakukan untuk menilai perbedaan tingkat keberhasilan penerapan SIPD dan SISKEUDES, khususnya kualitas tenaga kerja, infrastruktur digital, dan dukungan kelembagaan. Selain menggunakan metode kualitatif, studi mendatang sebaiknya juga mencampurkan pendekatan kuantitatif, misalnya dengan menilai dampak pemanfaatan sistem digital terhadap kualitas laporan keuangan, temuan audit, atau indeks transparansi fiskal di daerah. Penelitian berikutnya juga perlu memperhatikan elemen non-teknis seperti budaya organisasi, kepemimpinan berbasis digital, literasi digital masyarakat, keamanan dan etika pengelolaan data, serta tingkat keterlibatan publik dalam pengawasan finansial daerah, sehingga hasil kajian tidak hanya menilai seberapa efektif teknologi yang diterapkan, tetapi juga kelanjutan dalam penyelenggaraan keuangan digital yang jelas, bertanggung jawab, dan berfokus pada kepentingan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan kesehatan, kesempatan, keberuntungan, kemudahan, kelancaran, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah berjudul “Pengaruh Inovasi Digital terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga” tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, perhatian, waktu, serta kebaikan dalam proses

penyusunan artikel ini. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ria Ekanindya Widyaningsih, S.E., M.Ak, dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, serta masukan, yang sangat membantu penyelesaian artikel ini. Terima kasih juga kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes), yang telah memberikan dukungan berupa data dan informasi terkait pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Saya juga berterima kasih kepada sahabat seperjuangan, Anggin Lestari Setiyaningrum, yang selalu memberi dukungan moral, terlibat dalam diskusi ilmiah, dan menjadi sumber motivasi. Terima kasih kepada keluarga tercinta, ayah Hadi Susanto, ibu Romidah, serta adik-adik saya, Andi Nurlia Cinta Rahayu dan Andi Syarifah Citra Rahayu, yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang tanpa henti. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang saya anggap seperti saudara, Dwi Listia Ningrum, Wijayanti Nur Aida, dan Alifia Nurvita Romadhoni, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini. Terakhir, terima kasih saya sampaikan kepada seseorang istimewa dalam hidup saya yang selalu mendoakan, memberikan perhatian, dan menyemangati dalam setiap langkah saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, D., Bracci, E., & Steccolini, I. (2022). Accounting and accountability for the digital transformation of public services. *Financial Accountability & Management*, 38(2), 145–151. <https://doi.org/10.1111/faam.12314>
- Agostino, D., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2021). Digitalization, accounting and accountability: A literature review and reflections on future research in public services. *Financial Accountability & Management*, 38(2), 152–176. <https://doi.org/10.1111/faam.12301>
- Amalia, M., & Suwondo, S. (2023). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 79–89.
- Daffa, A. M. (2024). *Pengelolaan keuangan daerah dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20249>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. (n.d.). *SIPD Kabupaten Purbalingga*. <https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga. (n.d.). *Pembukaan Bintek Siskeudes berbasis online*. <https://dinpermasdes.purbalinggakab.go.id/pembukaan-bintek-siskeudes-berbasis-online>
- Fitriani, L. (2024). *Pengaruh implementasi sistem informasi pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh teknologi informasi* (Tesis). <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.32328>
- Jin, P., & Wang, Z. (2025). Digital budget supervision governance and local government fiscal transparency. *International Review of Economics & Finance*, 102, Article 104306. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104306>
- Koo, E. (2019). *Digital transformation of government: From e-government to intelligent e-government* (Master's thesis, Massachusetts Institute of Technology). <https://hdl.handle.net/1721.1/121792>
- Larsson, A., & Teigland, R. (Eds.). (2020). *Digital transformation and public services: Societal impacts in Sweden and beyond*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429319297>
- Liebowitz, J. (Ed.). (2022). *Digital transformation for the university of the future*. World Scientific. <https://doi.org/10.1142/12773>
- Lips, M. (2020). *Digital government: Managing public sector reform in the digital era*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315622408>
- Nadaa, D., & Priyanti, E. (2023). Inovasi digital dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi SISKEUDES. *Matra Pembaruan*, 7(1), 61–73. <https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.61-73>
- Nur Pratiwi, D., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 217–223. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Portal Data Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). *Dataset SIPD Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga Tahun 2017*. <https://data.jatengprov.go.id>
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145–158. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1719>
- Saldanha, D. M. F., Dias, C. N., & Guillaumon, S. (2022). Transparency and accountability in digital public services: Learning from the Brazilian cases. *Government Information Quarterly*, 39(2), Article 101680. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101680>
- Sunardi, Murwaningsari, E., Martani, D., & Mayangsari, S. (2021). The role of government internal control system quality in moderating the relationship of financial reports quality and local government performance. *Account and Financial Management Journal*, 6, Article 06. <https://doi.org/10.47191/afmj/v6i6.03>

- Thareq Kemal. (2022). Implementasi inovasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) 2.0 dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9), 1278–1285. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1930>
- Walo, J., Yanuarko, A., Asrori, A., Apriani, T., Riva, A., Faruk, M. S. U. A., Palupi, S. P., Sari, N. R., & Kusumaningrum, D. A. (2021). *Inovasi digitalisasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan inovasi bentuk lainnya pada daerah terinovatif*. Bina Praja Press, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. <https://books.google.co.id/books?id=KrlgEAAQBAJ>